

**PEMENUHAN MUTU STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN JENJANG SMP
DI KOTA PAREPARE PROPINSI SULAWESI SELATAN**

oleh

Ainun Farida

E-mail: ainun_farida@yahoo.com

Widyaiswara LPMP Sulawesi Selatan

ABSTRAK

Konsep sistem penjaminan mutu pendidikan menyatakan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan benar dan akurat. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai *base-line* data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana mendapatkan gambaran capaian mutu terhadap standar nasional pendidikan terutama bagi pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota untuk jenjang SMP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran capaian mutu standar nasional pendidikan jenjang SMP di kota Parepare dan mengetahui indikator-indikator apa saja yang paling bermasalah pada jenjang SMP di Kota Parepare. Kegunaan penelitian secara teoritis adalah memberikan masukan terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan, sedangkan kegunaan praktisnya adalah bagi Dinas Pendidikan kabupaten/kota agar dapat membuat kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan yang berbasis data dengan akurat serta bagi sekolah agar dapat mengetahui capaian mutu berdasarkan standar nasional pendidikan.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang menyajikan capaian mutu terhadap indikator yang terdapat dalam standar nasional pendidikan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah semua sekolah yang terdaftar dalam aplikasi Padamu Negeri yang mengisi kuesioner dalam aplikasi di Kota Parepare. Hasil penelitian ini adalah adanya gambaran capaian mutu standar nasional pendidikan jenjang SMP di Kota Parepare per standar dan indikator. Di samping itu juga didapatkan sepuluh indikator standar nasional pendidikan yang paling bermasalah untuk jenjang SMP di Kota Parepare.

Kata kunci : Penjaminan Mutu Smp, Standar Nasional Pendidikan

ABSTRACT

According educational quality assurance concept that improving the quality of education should be implemented based on data that has been analyzed correctly and accurately. The Analysis of this data make recommendations that can be used as a base-line data for the basic plan activities and quality improvement program proportionally, accurate, and sustainable. One problem that often arises is how to get describe of the achievements of the quality of the indicators contained in the national education standards, especially for local governments, particularly the district/city for the primary school. The purpose of this study is to describe the quality of national standards of educational achievement in Junior high school in the region of Pare Pare and knowing what indicators are most problematic in Junior High schools in the Region of Pare-Pare. Usability research theoretically is to provide input on the implementation of quality assurance system of education, while the practical uses is for the Ministry of Education and Culture and region in order to make the right policy objectives according to the needs based on the data with accurate and for the school to be aware of the achievements of quality based on national education standards. This research method uses descriptive research which presents the achievements of the quality of the indicators contained in the national education standards. Population and sample in this research is all schools listed in the application of quality mapping Ministry of Education and Culture who filled out a questionnaire in the applications in Region of Parepare. Results of this research is the

description of the achievements of the national standard quality junior high education in Parepare per standards and indicators. In addition it also obtained ten indicators of national standards of education are the most problematic for the junior high school in Parepare

Key Words: *Quality Assurance Smp, National Education Standards*

A. PENDAHULUAN

Melalui Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Nasional (khususnya tentang akselerasi SPMP), upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan menjadi fokus perhatian berbagai instansi terkait, khususnya sekolah, untuk dapat diimplementasikan secara baik dan benar sesuai dengan konsep dan mekanisme yang telah dirumuskan dalam SPMP. Dalam konsep SPMP, peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai *base-line* data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat dan berkelanjutan.

Undang - undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Di lain pihak dengan diberlakukannya Undang - undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisi kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Keragaman potensi sumberdaya pendidikan di daerah yang ada menyebabkan mutu keluaran sekolah sangat bervariasi. Keberadaan satuan pendidikan baik secara jenjang dan jenis di Indonesia yang tersebar di seluruh Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman layanan proses, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta mutunya. Oleh karena itu, standarisasi mutu regional dan

nasional merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu, dimana semua fungsi manajemen yang dijalankan diarahkan semaksimal mungkin dapat memberikan layanan yang sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu (*quality control*). Pengendalian mutu dalam pengelolaan pendidikan tersebut dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya pendidikan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pengendalian mutu dalam bentuk jaminan atau assurance, agar semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Konsep yang terkait dengan hal ini dalam manajemen mutu dikenal dengan Quality Assurance atau penjaminan mutu.

Berdasarkan Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) disebutkan bahwa Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah suatu proses evaluasi yang bersifat internal dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKS dan RKAS dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah secara konsisten dan berkelanjutan, serta sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kab/kota. Tujuan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah: (a) Menilai kinerja sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan

(SNP), (b) Mengetahui tahapan pengembangan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan; dan (c) Menyusun RKS/RKAS sesuai kebutuhan nyata dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Lingkup Evaluasi Diri Sekolah (EDS) menjawab 3 pertanyaan utama : (1) Seberapa baik kinerja sekolah kita?; (2) Bagaimana kita mengetahuinya?; dan (3) Bagaimana kita memperbaikinya?. Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dilaksanakan oleh Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri atas: (1) Kepala Sekolah; (2) Unsur guru; (3)siswa dan (4) Pengawas – sebagai fasilitator /pembimbing /verifikator. Instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS) terdiri dari 8 (delapan) Standar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Setiap Standar terdiri atas beberapa komponen. Setiap Komponen terdiri dari beberapa Indikator. Setiap komponen terdiri dari beberapa sub komponen. Setiap Indikator memberikan gambaran lebih rinci dari informasi kinerja sekolah.

Kota Parepare adalah salah satu pemerintah daerah di Propinsi Sulawesi Selatan yang sangat *concern* terhadap mutu pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai *base-line* data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat dan berkelanjutan.

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana gambaran capaian mutu standar nasional pendidikan untuk jenjang SMP, dan indikator-indikator standar nasional pendidikan yang paling bermasalah pada jenjang SMP di Kota Parepare. Sedangkan tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui gambaran capaian mutu standar nasional pendidikan untuk jenjang SMP, dan indikator-indikator standar nasional pendidikan yang paling bermasalah pada jenjang SMP di Kota Parepare.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif terhadap data sekunder hasil pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah I:

- Konversi jawaban responden (siswa, guru, kepala sekolah) ke skor mutu
- Rata-ratakan skor mutu setiap angket (siswa, guru, kepala sekolah) untuk setiap sekolah
- Hasil pada tahap (2), gabungkan data angket siswa, guru dan kepala sekolah

Langkah II:

Setiap Indikator mutu dihitung berdasarkan rata-rata dari jawaban angket siswa, guru dan kepala sekolah, untuk pertanyaan yang berpadanan.

Langkah III:

Menghitung skor mutu setiap standar berdasarkan pembobotan setiap indikator. Adapun formulayang digunakan untuk setiap standar adalah sebagai berikut :

Standar 1= $w_1 \text{ indk11} + w_2 \text{ indk12} + w_3 \text{ indk13} + w_4 \text{ indk14} + w_5 \text{ indk15}$

Standar 2= $w_1 \text{ indk21} + w_2 \text{ indk22} + w_3 \text{ indk23} + w_4 \text{ indk24}$

Standar 3= $w_1 \text{ indk31} + w_2 \text{ indk32} + w_3 \text{ indk33} + w_4 \text{ indk34} + w_5 \text{ indk35} + w_6 \text{ indk36} + w_7 \text{ indk37} + w_8 \text{ indk38}$

Standar 4= $w_1 \text{ indk41} + w_2 \text{ indk42} + w_3 \text{ indk43} + w_4 \text{ indk44} + w_5 \text{ indk45}$

Standar 5= $w_1 \text{ indk54} + w_2 \text{ indk56}$

Standar 6= $w_1 \text{ indk61} + w_2 \text{ indk62} + w_3 \text{ indk63} + w_4 \text{ indk64} + w_5 \text{ indk65} + w_6 \text{ indk66} + w_7 \text{ indk67}$

Langkah IV:

Menghitung skor mutu SNP berdasarkan pembobotan setiap standar. Adapun formula yang digunakan adalah sebagai berikut : $\text{SNP} = w_1 \text{ Standar1} + w_2 \text{ Standar2} + w_3 \text{ Standar3} + w_4 \text{ Standar4} + w_5 \text{ Standar5} + w_6 \text{ Standar6}$. Besarnya bobot yang digunakan untuk masing-masing standard dan bobot dalam perhitungan SNP dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.
Bobot untuk perhitungan SNP

Standar	Bobot
SKL	15%
Standar Isi	15%
Standar Proses	15%
Standar Penilaian	10%
Standar PTK	15%
Standar Pengelolaan	10%
Standar sarana dan prasarana	10%
Standar Pembiayaan	10%

Tabel 2.
Bobot Indikator Untuk Perhitungan Masing-Masing Standar Mutu

Indikator SKL	BOBOT
Prestasi siswa/lulusan	25.0%
Lulusan menunjukkan karakter (jujur, disiplin, bertanggungjawab, dan menghargai orang lain)	12.5%
Lulusan mampu berpikir logis dan sistematis	12.5%
Lulusan mampu berkomunikasi efektif dan santun	12.5%
Lulusan memiliki kemampuan mengamati dan bertanya untuk berpikir dan bertindak produktif serta kreatif	12.5%
Lulusan memiliki pengetahuan faktual dan konseptual	12.5%
Indikator Standar Isi	BOBOT
Kurikulum sesuai dengan kurikulum nasional	10.0%
Kurikulum disusun secara logis dan sistematis	10.0%
Kurikulum relevan dengan lingkungan dan kebutuhan	10.0%
Revisi kurikulum dilakukan secara berkala	10.0%
Penggunaan instrumen penilaian sesuai standar	10.0%
Pengembangan materi ajar sesuai standar	10.0%
Materi pelajaran memuat aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan secara proporsional	10.0%
Materi ajar sesuai dengan SKL	10.0%
Materi ajar terkait dengan kebutuhan peserta didik	10.0%
Cakupan struktur kurikulum memenuhi Standar	10.0%
Indikator Standar Proses	BOBOT
RPP yang dikembangkan sesuai dengan SKL dan standar isi serta memenuhi aspek kualitas	20.0%
PBM dilakukan secara efisien dan efektif untuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku	10.0%
PBM mengembangkan karakter jujur, disiplin, bertanggungjawab, dan menghargai orang lain	10.0%
PBM mengembangkan kemampuan berkomunikasi efektif dan santun	10.0%
PBM mengembangkan kreatifitas peserta didik	10.0%
PBM mengembangkan budaya dan kemandirian belajar	10.0%
Interaksi guru-siswa mendukung efektifitas PBM	15.0%
Suasana akademik di sekolah mendukung pembelajaran (konduusif)	15.0%
Indikator Standar Penilaian	BOBOT
Guru menggunakan prinsip-prinsip penilaian	10.0%
Guru melakukan perancangan penilaian	5.0%
Guru menyusun instrumen sesuai dengan kaidah yang baku	5.0%
Sekolah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal	5.0%
Sekolah memiliki dokumen prosedur dan kriteria penilaian	5.0%
Satuan pendidikan melakukan rapat dewan pendidik	5.0%
Guru menyusun instrumen penilaian	5.0%
Guru melakukan penilaian pengetahuan peserta didik	5.0%
Guru melakukan penilaian karakter peserta didik	5.0%
Guru melakukan peniln perilaku peserta didik	5.0%
Guru menilai Kompetensi peserta didik dalam berkomunikasi efektif dan santun	5.0%
Guru melakukan penilaian kreatifitas peserta didik	5.0%
Guru melakukan penilaian keterampilan peserta didik	5.0%

Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester	5.0%
Sekolah melaporkan hasil penilaian kepada orang tua dan dinas pendidikan Kab/Kota	5.0%
Guru melakukan analisis dan memanfaatkan hasil penilaian	10.0%
Guru memanfaatkan hasil penilaian	10.0%
Indikator Standar PTK	BOBOT
Guru mengajar sesuai bidang studinya	20.0%
Jumlah guru dan tenaga kependidikan mencukupi kebutuhan	20.0%
Guru dan tenaga kependidikan bekerja secara efektif dan efisien dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu	20.0%
Guru dan tenaga pendidikan profesional dalam bidangnya	20.0%
Guru dan kepala sekolah dapat dijadikan teladan oleh siswa	10.0%
Peningkatan kompetensi PTK dilakukan utk memenuhi kebutuhan sekolah	10.0%
Indikator Standar Pengelolaan	BOBOT
Visi, misi, dan tujuan sekolah sesuai dengan EDS	5.0%
Visi, misi, dan tujuan sekolah dipahami oleh semua warga sekolah	10.0%
Rencana kerja sekolah sesuai EDS	10.0%
Rencana kerja sekolah berorientasi mutu	5.0%
Perencanaan sekolah terkait peningkatan mutu PBM	5.0%
Suasana organisasi mendukung program sekolah	10.0%
Pimpinan melakukan supervisi dan evaluasi sesuai standard	5.0%
Pelaksanaan program sekolah berorientasi mutu	5.0%
Sekolah memiliki prosedur operasional baku (POB)	10.0%
Pelaksanaan kegiatan sekolah mengikuti tahapan yang tepat	5.0%
Kegiatan sekolah terkait pencapaian visi	5.0%
Suasana sekolah mendukung pembelajaran	5.0%
Pengelolaan sekolah dilaksanakan secara efektif dan efisien	10.0%
Kepala sekolah menjadi teladan	5.0%
Pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel	5.0%
Indikator Standar Sarana & Prasarana	BOBOT
Jumlah dan kondisi prasarana cukup dan memadai	50.0%
Prasarana dan sarana digunakan secara efisien dan efektif untuk pelaksanaan PBM yang berkualitas	30.0%
Kondisi prasarana nyaman dan memadai	10.0%
Prasarana dan sarana dirawat/dipelihara secara teratur	10.0%
Indikator Standar Pembiayaan	BOBOT
Ada unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam rapat penetapan besaran pembiayaan yang harus ditanggung oleh orang tua murid (jika ada seperti untuk karya wisata, dll)	10.0%
Sekolah menghitung besaran biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)	15.0%
Sekolah menghitung besaran biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan	15.0%
Sekolah menghitung besaran biaya pembinaan kegiatan kesiswaan /ekstrakurikuler pada tahun berjalan	5.0%
Pembiayaan dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan mutu sekolah dan PBM yang berkualitas	30.0%
Ada bantuan pembiayaan dari sekolah untuk peserta didik yang kurang mampu	10.0%
Sekolah memiliki dokumen nilai aset secara menyeluruh	5.0%
Penggunaan dan pelaporan pendanaan dilakukan secara akuntabel	10.0%

Pada tahapan analisis, yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan data. Apabila pada tahap ini tersedia data lengkap untuk seluruh objek maka analisis yang dilakukan sifatnya hanya deskripsi saja. Sedangkan apabila data yang tersedia hanya sebagian saja (sampel) maka analisis yang dapat dilakukan mulai dari deskripsi dan selanjutnya dapat juga dilakukan proses analisis pendugaan. Hasil pendugaan yang diperoleh memiliki presisi yang baik jika sampel yang digunakan merupakan sampel

acak yang mampu merepresentasikan populasi dengan baik. Representasi populasi dapat dilihat dari keterwakilan setiap kelompok dalam populasi, apakah setiap kelompok terwakili secara proporsional.

Hasil analisis data EDS tahun 2013 mendeskripsikan tingkat ketercapaian sekolah-sekolah di tingkat kabupaten/kota dalam pemenuhan SNP. Skor yang digunakan menggunakan interval 0 - 10 dengan pembagian pencapaian SNP sebagai berikut:

Tabel 3.
Kriteria Capaian SNP

KELOMPOK	Y	X
Menuju SNP 1	$Y < 65\%$	$\sum n.X/n < 65\%$
Menuju SNP 2	$Y \geq 65\%$	$\sum n.X/n < 65\%$
Menuju SNP 3	$Y < 65\%$	$\sum n.X/n \geq 65\%$
SNP	$Y \geq 65\%$	$\sum n.X/n \geq 65\%$
Di Atas SNP	$Y \geq 85\%$	$\sum n.X/n \geq 85\%$

Keterangan :

	STANDAR	BOBOT
Y	SKL	
X1	ISI	20%
X2	PROSES	30%
X3	PENILAIAN	15%
X4	PTK	25%
X5	PENGELOLAAN	10%

Sekolah dikatakan telah mencapai kriteria Menuju SNP 1 apabila skor untuk Standar Kompetensi Lulusan (Y) lebih kecil dari 6,5 dan jumlah standar lainnya berdasarkan bobot yang ditetapkan juga lebih kecil dari 6,5. Kriteria Menuju SNP 2 apabila skor untuk Standar Kompetensi Lulusan (Y) lebih besar atau sama dengan 6,5 dan jumlah standar lainnya berdasarkan bobot yang ditetapkan lebih kecil dari 6,5. Kriteria Menuju SNP 3 apabila skor untuk Standar Kompetensi Lulusan (Y) lebih kecil dari 6,5 dan jumlah standar lainnya berdasarkan bobot yang ditetapkan lebih besar atau sama dengan 6,5. Kriteria Mencapai SNP apabila skor untuk Standar Kompetensi Lulusan (Y) lebih besar atau sama dengan 6,5 dan jumlah standar lainnya berdasarkan bobot yang ditetapkan juga lebih besar atau sama dengan 6,5. Kriteria Di Atas SNP apabila skor untuk Standar Kompetensi Lulusan (Y) lebih besar atau sama dengan 8,5 dan jumlah standar lainnya berdasarkan bobot yang ditetapkan juga lebih besar atau sama dengan 8,5.

C. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data hasil EDS Tahun 2013 diperoleh informasi jumlah Sekolah Dasar berdasarkan kategori capaian Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.
Jumlah SMP Berdasarkan Kategori Capaian SNP

NO	KATEGORI	JUMLAH SMP
1	MENUJU SNP 1	7
2	MENUJU SNP 2	0
3	MENUJU SNP 3	13
4	SNP	0
5	DI ATAS SNP	0
TOTAL		20

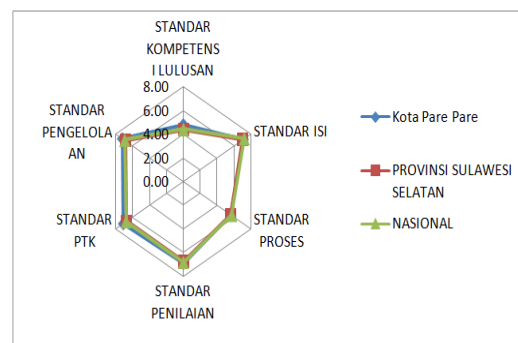
Sumber : Hasil Pengolahan Data EDS, 2013

Berdasarkan hasil pengolahan data EDS Tahun 2013, diketahui bahwa dari total 20 sekolah SMP yang ada di Kota Parepare, terdapat 7 sekolah yang berada pada capaian “Menuju SNP 1”, tidak ada sekolah berada pada capaian “Menuju SNP 2”, 13 sekolah berada pada capaian Menuju SNP 3, belum ada sekolah yang sudah mencapai “SNP”, dan belum ada sekolah dasar yang berada pada capaian “Di atas SNP”.

Capaian Mutu Per Standar

Tabel 5.
Capaian SNP Jenjang SMP Kota Parepare

SATANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	CAPAIAN
SNP	6.37
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	4.79
STANDAR ISI	7.11
STANDAR PROSES	5.59
STANDAR PENILAIAN	6.90
STANDAR PTK	7.11
STANDAR PENGELOLAAN	7.22



Gambar 1. Grafik Radar Capaian SNP Jenjang SMP Kota Parepare

Berdasarkan Tabel 5 dan Gambar 1. dapat diketahui bahwa capaian SNP jenjang SMP pada Kota Parepare untuk Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar PTK, dan Standar Pengelolaan berada di atas rata-rata

capaian tingkat Provinsi Sulawesi Selatan serta tingkat nasional.

jenjang SMP di Kota Parepare ditunjukkan pada Tabel 6 berikut:

Capaian Mutu Per Indikator

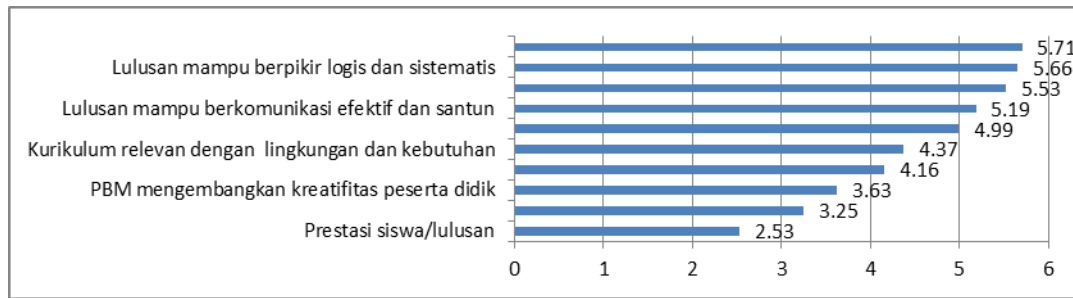
Capaian mutu setiap indikator pada masing-masing Standar Nasional Pendidikan untuk

Tabel 6
Capaian Mutu Per Indikator

Standar/Indikator	SNP Kota Pare Pare	SNP Provinsi	SNP Nasional
Standar Kompetensi Lulusan			
Prestasi siswa/lulusan	4.00	2.78	2.67
Lulusan menunjukkan karakter (jujur, disiplin, bertanggungjawab, dan menghargai orang lain)	5.52	5.57	5.61
Lulusan mampu berpikir logis dan sistematis	4.86	4.77	4.95
Lulusan mampu berkomunikasi efektif dan santun	4.90	4.91	4.96
Lulusan memiliki kemampuan mengamati dan bertanya untuk berpikir dan bertindak produktif serta kreatif	5.44	5.30	5.45
Standar Isi			
Kurikulum sesuai dengan kurikulum nasional	7.11	6.65	6.89
Kurikulum disusun secara logis dan sistematis	7.19	7.08	7.33
Kurikulum relevan dengan lingkungan dan kebutuhan	8.55	8.67	8.74
Revisi kurikulum dilakukan secara berkala	5.59	5.57	5.88
Standar Proses			
RPP yang dikembangkan sesuai dengan SKL dan standar isi serta memenuhi aspek kualitas	6.97	6.82	7.05
PBM dilakukan secara efisien dan efektif untuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku	5.15	5.22	5.39
PBM mengembangkan karakter jujur, disiplin, bertanggungjawab, dan menghargai orang lain	6.97	7.04	7.21
PBM mengembangkan kemampuan berkomunikasi efektif dan santun	5.37	5.55	5.74
PBM mengembangkan kreatifitas peserta didik	2.71	2.82	2.87
PBM mengembangkan budaya dan kemandirian belajar	3.04	2.98	3.13
Interaksi guru-siswa mendukung efektifitas PBM	5.96	6.27	6.37
Suasana akademik di sekolah mendukung pembelajaran (konduusif)	6.50	6.30	6.21
Standar Penilaian			
Guru menggunakan prinsip-prinsip penilaian	7.37	7.20	7.31
Guru melakukan perancangan penilaian	8.12	7.81	7.75
Guru menyusun instrumen sesuai dengan kaidah yang baku	5.97	6.07	6.19
Sekolah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal	4.21	4.34	4.43
Sekolah memiliki dokumen prosedur dan kriteria penilaian	8.33	7.96	8.12
Standar PTK			
Guru dan tenaga pendidikan profesional dalam bidangnya	8.00	7.38	7.43
Peningkatan kompetensi PTK dilakukan utk memenuhi kebutuhan sekolah	5.32	5.44	5.56
Standar Pengelolaan			
Visi, misi, dan tujuan sekolah sesuai dengan EDS	6.31	6.28	6.60
Visi, misi, dan tujuan sekolah dipahami oleh semua warga sekolah	9.09	8.20	8.43
Rencana kerja sekolah sesuai EDS	6.15	6.00	6.05
Rencana kerja sekolah berorientasi mutu	8.13	7.09	7.21
Perencanaan sekolah terkait peningkatan mutu PBM	8.37	7.92	8.10
Suasana organisasi mendukung program sekolah	8.06	7.94	7.96
Pimpinan melakukan supervisi dan evaluasi sesuai standar	2.77	2.84	2.88

Berdasarkan capaian mutu per indikator pada Tabel 6 di atas, diketahui 10 (sepuluh) indikator yang paling bermasalah

pada jenjang pendidikan sekolah SMP di Kota Parepare adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Sepuluh Indikator SNP Paling Bermasalah di Kota Parepare jenjang SMP

D. PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa berdasarkan jumlah sekolah SMP di Kota Parepare yang berjumlah 20 sekolah dapat diketahui ada 13 sekolah yang berada pada tahap menuju SNP 3 dan ada 7 sekolah yang masih berada pada tahap menuju SNP 1, tidak ada satu pun sekolah yang sudah sesuai dengan SNP, apalagi yang berada di atas SNP. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan sekolah SMP di Kota Parepare belum memenuhi standar. Sedangkan apabila dilihat dari capaian mutu per standar, capaian mutu yang paling rendah adalah pada standar kompetensi lulusan yang capaiannya berada pada 4,79. Nilai capaian standar kompetensi lulusan yang hanya 4,79 ini adalah akibat dari capaian standar yang lain yang juga masih rendah. Capaian standar kompetensi lulusan merupakan hasil atau akibat dari pengelolaan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Bagaimana mungkin dapat menghasilkan lulusan yang sesuai standar bila input yang berupa isi atau kurikulum, sarana dan prasarana, pembiayaan, pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak sesuai standar, setelah itu mengalami proses pembelajaran, penilaian dan pengelolaan yang tidak sesuai standar. Dengan demikian sekolah, dinas pendidikan, pemerintah daerah dalam hal kabupaten/kota dan propinsi serta pemerintah pusat harus bisa mendorong agar isi atau kurikulum, sarana dan prasarana, pembiayaan, pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai standar, setelah itu mengalami proses pembelajaran, penilaian dan pengelolaan yang sesuai standar. Dari capaian standar yang terendah yaitu

kompetensi lulusan dan proses. Maka permasalahan yang sangat krusial adalah pada proses pembelajaran. Dari proses pembelajaran yang tidak sesuai standar akan sangat mempengaruhi hasil dari lulusan yang dihasilkan. Dengan demikian dapat dijadikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan bahwa mutu proses yang masih rendah agar dapat dijadikan pokok perhatian untuk mengambil tindakan yang dianggap relevan sehingga terselesaikan. Dari capaian standar pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 7,11 dapat diketahui bahwa kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sudah hampir memenuhi standar, akan tetapi sebagai pelaku proses pembelajaran yang sangat menentukan mutu proses pembelajaran yang capaian mutu proses masih rendah hal ini menimbulkan ironi, sehingga perlu dicarikan penyebab atau indikator mana yang capaiannya yang rendah. Dari capaian mutu setiap indikator pada standar proses, yang paling rendah adalah proses belajar mengajar mengembangkan kreatifitas peserta didik sebesar 2,71, kemudian capaian indikator proses belajar mengajar mengembangkan budaya dan kemandirian belajar sebesar 3,04. Capaian indikator proses belajar mengajar dilakukan secara efektif dan efisien untuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sebesar 5,15. Dari capaian per indikator dapat diketahui indikator mana saja yang masih harus segera dicarikan solusi, sehingga mutu proses pembelajaran dapat segera ditingkatkan karena sangat berkorelasi dengan lulusan yang dihasilkan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian mutu proses adalah dengan memaksimalkan bimbingan guru senior kepada guru yang lain dalam hal proses pembelajaran, memaksimalkan fungsi supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah dan

pengawas sekolah dalam mengawal mutu proses pembelajaran. Disamping itu juga perlu dilakukan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan karena dilihat dari capaiannya hanya sebesar 5,32. Dari hasil capaian per indikator standar nasional pendidikan dapat dilihat bahwa ada sepuluh indikator yang paling bermasalah yang sangat menentukan capaian dari standar kelulusan. Sepuluh indikator tersebut adalah prestasi siswa/lulusan, pimpinan melakukan supervisi dan evaluasi sesuai standar, proses belajar mengajar mengembangkan kreatifitas peserta didik, proses belajar mengajar mengembangkan kemampuan berkomunikasi efektif dan santun, kurikulum relevan dengan lingkungan dan kebutuhan, proses belajar mengajar dilakukan secara efisien dan efektif untuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku. Lulusan mampu berkomunikasi efektif dan santun, revisi kurikulum dilakukan secara berkala, lulusan mampu berpikir logis dan sistematis, serta sekolah menetapkan kriteria ketuntasan minimal. Dari sepuluh indikator yang paling bermasalah tersebut sebagian besar adalah pada standar proses yang sangat mempengaruhi mutu lulusan yang dihasilkan. Sekolah, pemerintah daerah, pemerintah propinsi, serta pemerintah pusat harus bisa bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada indikator standar nasional pendidikan yang masih bermasalah yaitu rendahnya capaian mutu. Diharapkan adanya strategi yang diambil secara tepat sehingga program-program yang dilaksanakan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah capaian mutu per-standar SNP SMP sudah berada di atas rata-rata standar Provinsi dan Nasional. Capaian indikator SNP tertinggi untuk SMP adalah Visi, misi, dan tujuan sekolah dipahami oleh semua warga sekolah dan terendah adalah prestasi siswa/lulusan.

Terdapat 10 indikator SNP SMP yang paling bermasalah yaitu: (1) prestasi siswa/lulusan, (2) pimpinan melakukan

supervisi dan evaluasi sesuai standar (3) PBM mengembangkan kreatifitas peserta didik, (4) PBM mengembangkan kemampuan berkomunikasi efektif dan santun, (5) kurikulum relevan dengan lingkungan dan kebutuhan, (6) PBM dilakukan secara efisien dan efektif untuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku, (7) Lulusan mampu berkomunikasi efektif dan santun, (8) revisi kurikulum dilakukan secara berkala, (9) Lulusan mampu berpikir logis dan sistematis, (10) Sekolah menetapkan kriteria ketuntasan minimal.

2. Saran

Dari sepuluh indikator yang paling bermasalah tersebut sebaiknya segera dicarikan solusi berupa program-program baik itu dilakukan oleh sekolah, pemerintah daerah, pemerintah propinsi, maupun pemerintah pusat sehingga ada koordinasi sehingga permasalahan-permasalahan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Tiro, Muhammad Arif. Ilyas, Baharuddin. *Statistika Terapan untuk Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Makassar, Andira Publisher, 2002.
- Budiarto, Eko. *Biostatistika untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*, Cetakan I, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2001.
- Furqan. *Statistika Terapan untuk Penelitian*, Edisi ketiga, Bandung, Alfabeta, 2001.
- Hartono, *Statistika untuk penelitian*, edisi revisi, cetakan ketiga, Pekanbaru, Zafana publishing, 2004.
- Mangkuatmodjo, Soegyarto. *Pengantar statistika* (cetakan pertama). JAKARTA, PT. Rineka Cipta, (2003).
- Rahardjo, Marsudi, *Statistika Bahan ajar Diklat Guru Pengembang SMU*, Yogyakarta, Pusat Pengembangan Penataran Guru (P3G Yogyakarta), 2003.